

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
MELALUI KARTU E-KUSUKA DI ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

SAFULLAH

NIM. 170404020

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN MELALUI KARTU E KUSUKA DI ACEH SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Diajukan Oleh

SAFULLAH
NIM. 170404020

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Muchlis Aziz, M.Si
NIP.195710151990021001



Rusnawati, S.Pd., M.Si.
NIP.197703092009122003

**LEMBAR PERSETUJUAN
TIM PENGUJI SIDANG HASIL SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Meraih Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

**Dengan Judul
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN MELALUI KARTU E
KUSUKA DI ACEH SELATAN**

**Diajukan Oleh
SAFULLAH
NIM 170404020**

**Darussalam-Banda Aceh, 1445 H/ 21 Desember 2023
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,


**Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NUK. 201806130719891065**

Sekretaris,


**Rusnawan, S.Pd., M.Si
NIP. 197703092009122003**

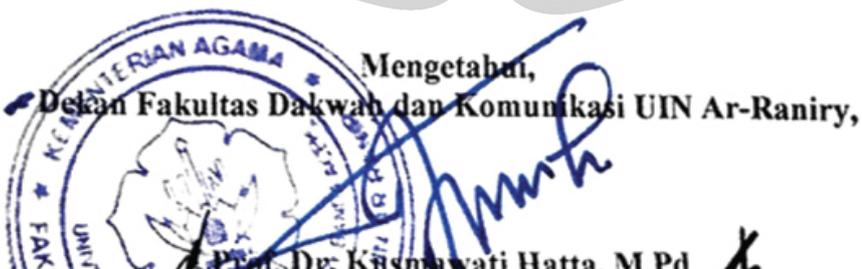
Anggota I,


**Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002**

Anggota II,


**Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A
NIP. 199111272020122017**

**Mengetahui,
Dean Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,**


**Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**

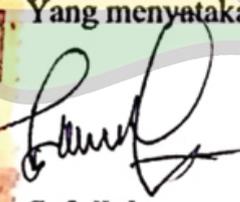


LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safullah
Tempat/Tgl. Lahir : Seubadeh, 05 Juni 1995
NIM : 170404020
Jenjang : Sarjana
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis skripsi ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak akan melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menganggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

AR - RAN Banda Aceh, 21 Desember 2023
Yang menyatakan,

Safullah
NIM. 170404020



KATA PENGANTAR



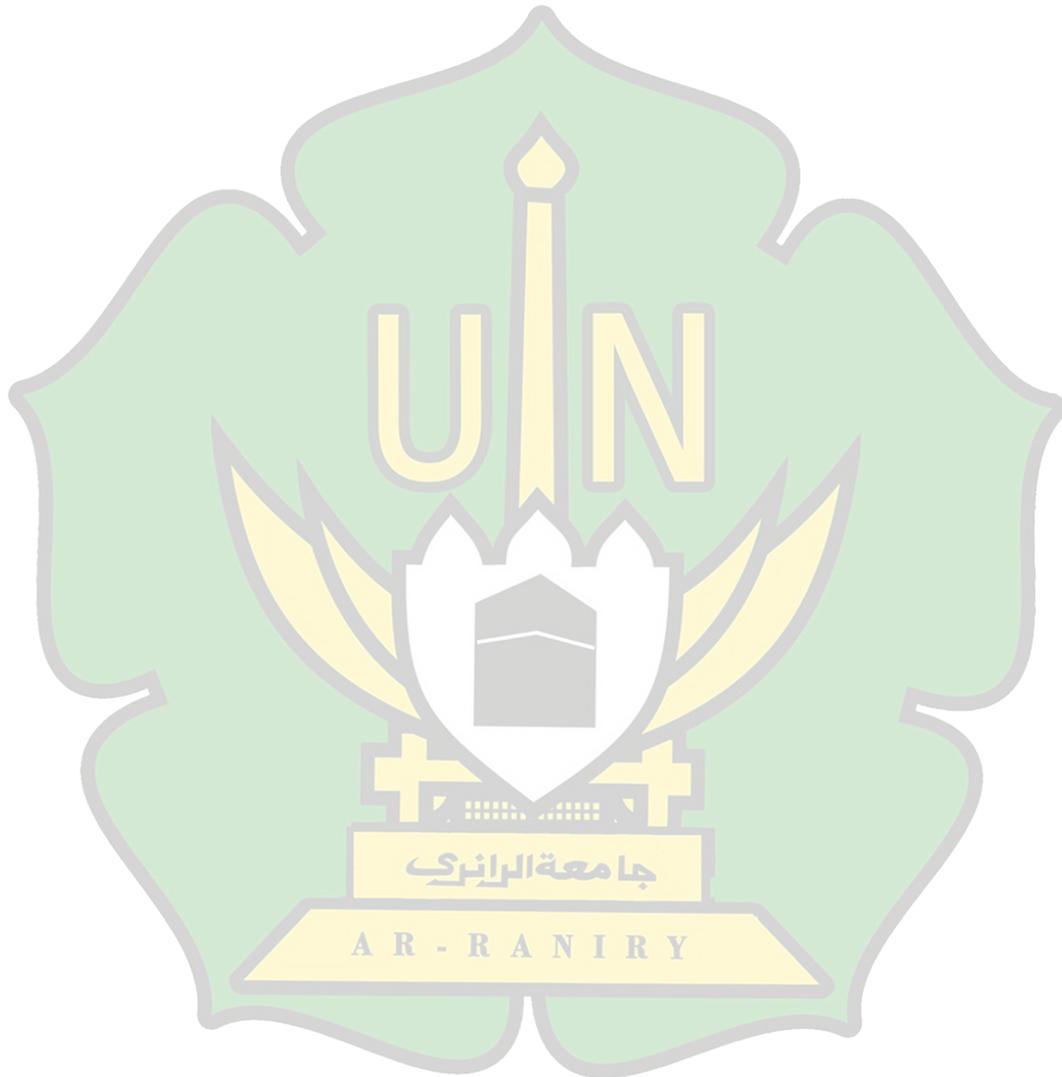
Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam lindungan-NYA. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah SAW, beserta para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW, yang telah menuntun umat manusia menuju kedamian dan membimbing kita menuju jalan yang Allah SWT ridho dan menuju agama yang Allah ridho yakni agama Islam. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu e kusuka di Aceh selatan Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi tanpa dukungan dari berbagi pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu tercinta Asnanur dan ayah yang menjadi panutan serta inspirasi saya Bapak Bahri, yang telah mendidik dan selalu memberikan semangat kerja keras dan selalu menguatkan penulis serta mencurahkan kasih sayang, dukungan dan do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis, berkat do'a dan dukungan ayah dan ibu sehingga penulis telah bisa menempuh pendidikan yang sangat bermakna demi mencapai cita-cita yang mulia.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta., M.A. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Dr. Rasyidah M.Ag. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) beserta Bapak Hasballah, Ibu Fatimah dan Ibu Maisarah yang telah memberikan pelayanan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Muchlis Aziz., M.Si dan Ibu Rusnawati SPd., M.Si sebagai dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta membantu dan memberikan arahan serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen program studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam melakukan penelitian.
5. Kepada bapak Jerry rahmat selaku Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan bapak T M Nazmin selaku *Keuchik gampong* Pasie seubadeh yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberi arahan serta informasi kepada peneliti ucapkan terimakasih banyak karena telah melayani penulis selama melakukan penelitian.

6. Kepada informan dalam penelitian ini penulis berterimakasih karena telah bersedia membantu penulis serta berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	4
E. Penjelasan Istilah.....	5
1. Program.....	5
2. Pemberdayaan	5
3. Masyarakat Nelayan.....	8
4. Kartu E Kusuka.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	13
1. Pemberdayaan Sebagai Konsep	13
2. Tahap Tahap Pemberdayaan Masyarakat.....	16
3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	19
4. Tujuan Pemberdayaan.....	20
C. Pemberdayaan Nelayan	21
Pemberdayaan Nelayan dan permasalahannya.....	21
Sebab-sebab Kemiskinan Nelayan.....	23
Fungsi dan Ruang Lingkup Kartu Kusuka.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28

B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Subjek Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Selatan	35
2. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan	39
3. Pendapatan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.....	41
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	43
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pemanfaatan Kartu E Kusuka	43
2. Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E Kusuka Dalam Mendukung Fasilitas Usaha Nelayan Di Aceh Selatan.....	49
3. Realisasi program-program melalui E Kusuka bisa diberdayakan masyarakat nelayan di Aceh Selatan.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pemanfaatan Kartu E Kusuka	58
2. Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E Kusuka Dalam Mendukung Fasilitas Usaha Nelayan Di Aceh Selatan.....	59
3. Apakah realisasi program-program melalui E Kusuka bisa diberdayakan masyarakat nelayan di Aceh Selatan?	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara	65
Lampiran Dokumentasi Kegiatan	66



ABSTRAK

Diantara upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pemberdayaan nelayan adalah dengan menerbitkan Kartu-E Kusuka melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adanya Kartu E-Kusuka ini diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, serta menjadi acuan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Aceh Selatan pemerintah sudah menyalurkan kartu E-Kusuka secara bertahap kepada seluruh nelayan di Aceh selatan namun ini tidak terealisasikan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E Kusuka di Aceh Selatan. Program pemberdayaan masyarakat nelayan di Aceh Selatan melalui pemanfaatan Kartu E-Kusuka mencakup beberapa aspek. Pertama, ada bantuan sosial yang dapat berupa subsidi bahan bakar atau alat tangkap ikan guna membantu pembinaan usaha para nelayan. Kedua, terdapat program pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan mengenai teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan efisien. Ketiga, akses permodalan juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan kemampuan ekonomi para nelayan sehingga mereka dapat melakukan budidaya ikan atau tambak garam secara lebih baik. Dari ketiga program tersebut masing-masing memiliki tantangan dan realitas pengaplikasian yang tidak mudah Dimana masyarakat sendiri masih banyak yang belum paham tentang kartu E-kusuka baik dari program yang diadakan maupun dari cara pengaplikasian Kartu tersebut. Sedangkan, pada kenyataannya kartu E-kusuka ini pun belum juga memberikan manfaat seperti yang di katakana akan memberikan kesejahteraan melalui pemberdayaan program yang di berikan. Bahkan pada kenyataannya masyarakat seolah di buat bingung oleh kartu ini. Terdapat banyak keluhan dari masyarakat nelayan yang menyatakan bahwa dampak yang diberikan oleh program ini masih terbatas dan kurang memadai. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain akses informasi tentang program yang masih belum jelas dan pemahaman tentang penggunaannya secara optimal. Selain itu, para nelayan juga mengharapkan pendampingan yang intensif dalam aspek-aspek pengelolaan usaha dan pemasaran produk. Dengan demikian, meskipun ada upaya dari Program E-Kusuka untuk melindungi pelaku industri kelautan dan perikanan di Aceh Selatan, namun implementasinya masih memiliki tantangan tersendiri.

Kata kunci : **Kartu E Kusuka, Nelayan, Aceh Selatan.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayah perairannya cukup luas, dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dan dapat menjadi andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Meskipun Indonesia negara kepulauan tetapi hanya sebagian kecil dari penduduknya yang berdiam hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Nelayan merupakan salah satu bagian dari elemen masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah yang ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber Sumber Daya Manusia (SDM) disebabkan rata-rata para nelayan hanya lulus sekolah dasar.¹

Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pernah menghiiasi visi-misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan membangun sistem maritim Indonesia yang tertinggal dan menjadikan maritim sebagai kekuatan diplomasi politik luar negeri.² Tentunya salah satu yang dimaksud dalam program tersebut adalah meningkatkan pemberdayaan nelayan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah adalah Provinsi Aceh. Aceh dengan luas wilayah laut 295.370 km², produksi perikanan laut Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 produksi perikanan laut mencapai 154.487,40 ton,

¹ Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hal. 8.

²Pembangunan Maritim Indonesia, 2022, <https://news.detik.com/berita/2605821/ini-visi-misi-jokowi-jk-soal-pembangunan-maritim-indonesia?9922032>= Diakses pada tanggal 23 mei 2022, jam 10.00.

meningkat 8% dari sebelumnya 145.883,6 ton pada 2012. Nilai produksi perikanan laut Aceh pada 2014 mencapai Rp 2,9 triliun. Diperkirakan potensi perikanan laut Aceh mencapai lebih dari 200.000 ton pertahun. Besarnya potensi perikanan laut dinilai masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan Aceh. Tetapi jika dikaitkan dengan persentase jumlah penduduk miskin Aceh yang mencapai 17,11% (di atas rata-rata Nasional), maka diduga kuat sebagian besar masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai nelayan masih belum berdaya.³

Salah satu wilayah di provinsi Aceh yang dianugerahi potensi kelautan dan perikanan yang besar salah satunya di Aceh Selatan. Posisi geografis Aceh secara umum berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional yaitu Samudera Hindia dan Selat Malaka, dapat menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan (PP) di Aceh Selatan. Aktivitas masyarakat nelayan pesisir Aceh Selatan banyak mengais rezki dengan menangkap ikan di sepanjang perairan dengan kondisi alat tangkap seadanya dan minimnya pemberdayaan nelayan tradisional di Aceh Selatan, untuk menangkap ikan nelayan masih menggunakan perahu kecil dan alat tradisional sehingga hasil tangkapannya kurang memadai. Selain minimnya alat tangkap dan pemberdayaan terhadap nelayan tradisional oleh pemerintah terkait kendala langkanya BBM bersubsidi juga menjadi momok bagi nelayan setempat sehingga tak jarang untuk mendapatkan BBM bersubsidi khususnya solar nelayan harus membeli di kios-kios eceran dan mobil-mobil pengecer sebab di SPBU tidak dapat di temukan BBM-

³ https://serambinews.com_Nelayan_Aceh. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018, jam 11.00

nya. Akibat hasil tangkapan nelayan sangat berpengaruh di tengah gencarnya kampanye pemberdayaan nelayan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Diantara upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pemberdayaan nelayan adalah dengan menerbitkan Kartu E Kusuka melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adanya Kartu E Kusuka ini diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, serta menjadi acuan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Aceh Selatan pemerintah sudah menyalurkan kartu E Kusuka secara bertahap kepada seluruh nelayan di Aceh selatan. Namun berdasarkan realita yang ada nelayan kecil (nelayan buruh) di aceh selatan mereka belum mengetahui sebenarnya apa manfaat dari kartu E Kusuka tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka situasi ini menarik untuk dikaji lebih jauh tentang **“Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E Kusuka di Aceh Selatan”**.

⁴<https://dkp.acehprov.go.id/index.php/profil/read/20122/10/12/116/pelabuhan-perikanan-Aceh-Selatan.html> Diakses pada tanggal 23 mei 2022, jam 14.00.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan kartu E Kusuka?
2. Bagaimana tantangan program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka di Aceh Selatan?
3. Bagaimana Realitas Program Pemberdayaan Kartu E Kusuka di Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan kartu E Kusuka.
2. Untuk mengetahui Bagaimana realisasi program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka dalam mendukung fasilitas usaha nelayan di Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah realisasi program-program melalui E Kusuka bisa diberdayakan masyarakat nelayan di Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi siapa saja yang berkepentingan di bidang Pengembangan Masyarakat Islam, terutama dalam meningkatkan pemberdayaan nelayan melalui program E Kusuka di Aceh Selatan.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak jadi kesalahpahaman para pembaca dalam memahami judul penelitian ini, penulis memandang perlu dalam menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Program

Program merupakan susunan rencana yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan dievaluasi pada masa akhir kepengurusan.

Menurut Soesanto, Arti program adalah sistem perencanaan suatu kegiatan dari organisasi maupun perusahaan agar memiliki arahan sehingga semua agendanya terpadu secara sistematis dengan dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

Program Kerja memiliki tujuan yaitu Membantu dalam pencapaian visi dan misi, Membantu dalam menjawab kebutuhan organisasi, dan juga Membantu

organisasi bekerja secara sistematis dan terstruktur

2. Pemberdayaan

Menurut Sumaryadi pemberdayaan adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya Membantu pengembangan ekonomi masyarakat lemah, masyarakat rentan, masyarakat miskin, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.⁵ Menurut Oos M. Anwas, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah.⁶

Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki

⁵ Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama.

⁶ Anwas, Oos M, 2013, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung : Alfa Beta.

daya saing, serta mampu hidup mandiri.

pemberdayaan menyiapkan masyarakat untuk mengelola sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar mampu hidup mandiri.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Meskipun pemberdayaan masyarakat tidak lahir dalam konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek kehidupan dasar manusia, seperti gizi, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku

dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik.⁷ Dengan demikian, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, semua potensi yang dimiliki didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

3. Masyarakat Nelayan

Nelayan adalah sekelompok masyarakat yang pada umumnya tumbuh dan berkembang di pesisir pantai yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut dan merupakan mata pencaharian yang utama. Seperti yang kita ketahui nelayan terdiri atas 3 ciri yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh ini adalah nelayan menggunakan setiap peralatan orang lain, dan jenis nelayan ini sangat banyak diminati di Aceh, sedangkan nelayan juragan adalah nelayan memiliki alat tangkap sendiri namun dipergunakan/dioperasikan oleh orang lain (nelayan buruh) dan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan dan mengoperasikannya sendiri.⁸

4. Kartu E Kusuka

Kartu E Kusuka merupakan identitas tunggal pelaku usaha dan merupakan integrasi dari Kartu dan Data Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2019 merupakan landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun di daerah. Sebelumnya KKP pernah menerbitkan beberapa kartu identitas profesi untuk masing-masing pelaku usaha berdasarkan unit eselon I teknis. Kartu Kusuka

⁷ Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama.

⁸ Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hal.10

adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan. Kartu Kusuka memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai identitas profesi nelayan, basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan, dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program kementerian⁹.



⁹ Bismar Himawan, (Analisis Pemanfaatan Kartu Kusuka Dalam Rangka Kesejahteraan Nelayan) Kota Makasar, Hlm 6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penulis sudah membaca berbagai macam penelitian yang terkait dengan judul skripsi yang penulis ajukan, yang bertujuan untuk menambah referensi dan sebagai acuan penulis di saat penelitian lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dwi Rachma yang berjudul “*Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Kota Banda Aceh*” (*Studi Kasus : Nelayan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh*). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Dengan rumusan masalah: Meninjau Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Gampong Lampulo Kota Banda Aceh ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tentang strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Gampong Lampulo Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan mendapatkan hasil bahwa Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan

nelayan dengan menerbitkan Kartu Nelayan, dengan adanya Kartu Nelayan bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada nelayan agar tepat sasaran. Namun dalam pelaksanaannya masih ada nelayan yang sudah memiliki Kartu Nelayan namun tidak pernah mendapatkan bantuan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu pelatihan, memberikan bantuan, membangun sarana dan prasarana serta pemberian bantuan premi asuransi nelayan, dari empat strategi belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien.

Dilihat dari dua aspek sumber permasalahan yang diteliti memang tidak jauh berbeda namun, focus penelitian yang saya lakukan berfokus pada pemberdayaan terkait kartu E-Kusuka. Sedangkan saya mengangkat judul tentang bagaimana pemberdayaan nelayan terkait kartu E-Kusuka di Aceh Selatan.¹⁰

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Arif Asdaf yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Sorong*”. Program Studi Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan Universitas Negeri Papua.

Rumusan Masalahnya yaitu Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kartu E-kusuka Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

¹⁰ Ramadhan, (*Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus : Nelayan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*. Hal 1.

penulis melihat ada beberapa masalah dalam proses implementasi yang dapat diangkat menjadi sebuah penelitian, yaitu masih kurang tahunya masyarakat tentang apa saja manfaat dari kartu E-Kusuka yang mereka punya. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan dalam menemukan alasan bagaimana implementasi kebijakan kartu E-Kusuka di Kabupaten Sorong dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu E-Kusuka Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan mengetahui faktor penghambat yang terjadi di lapangan.

Penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan mendapatkan hasil tentang kebijakan kartu E-Kusuka di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yang di rasakan oleh masyarakat belum optimal, dibuktikan hasil yang diperoleh, pelaku usaha kelautan dan perikanan banyak yang belum merasakan manfaat dari adanya Kartu E-Kusuka disebabkan kurangnya komunikasi oleh pelaksana kebijakan untuk menggaet pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam program asuransi. Dimana seharusnya kebijakan ini baik bagi masyarakat tapi malah sebaliknya tidak di rasakan oleh para nelayan.¹¹

Dari hasil penelitian diatas, Penulis mendapatkan perbedaan yaitu masing-masing membahas bagaimana pendapatan, strategi pemerintah, upaya-upaya dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan judul penelitian yang saya angkat yaitu tentang “program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu Kusuka di Aceh Selatan” dimana maksud dari peneliti adalah ingin mengetahui apa saja peran dan bagaimana realisasinya serta ingin mengetahui

¹¹ Muhammad Nur Arif Asdaf, (Implementasi Kebijakan Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Sorong). Hal 2

apakah program-program E Kusuka bisa diberdayakan terhadap masyarakat nelayan di Aceh Selatan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Sebagai Konsep

Pemberdayaan adalah sebuah ‘proses menjadi’ bukan sebuah ‘proses instansi’. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai 3 tahap yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.¹² Pemberdayaan pada akhirnya bukanlah sekedar teori sebagaimana dikatakan Ron Johnson dan David Redmod bahwa *at last, empowerment is about art. It is about value we believe*. Tatkala pemberdayaan menjadi salah satu praktek dan seni, yang mengemuka adalah bagaimana memanager proses pemberdayaan, artinya pemberdayaan tidak boleh bermakna merobotkan” atau ‘menyeragamkan”. Pemberdayaan juga memberikan ruang pada pengembangan keberagaman kemampuan manusia yang berbeda-beda, dengan asumsi satu sama lain akan melengkapi. Pemberdayaan merupakan proses alamiah.¹³

Pemberdayaan merupakan konsep kehidupan proses alamiah, kehidupan itu perlu dan harus di manager. Konsep manager berbeda dengan rekayasa karena manager lebih fokus pada meningkatkan nilai tambah suatu aset. Jadi pemberdayaan bukanlah semata mata konsep politik melainkan pada konsep suatu manager dan pada akhirnya pemberdayaan akan mempunyai indikator akan

¹²Randy R. Wrihatolono Dan Riant Nugroho Dwijowojoto, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo, 2007), 2.

¹³ *Ibid*

keberhasilan.¹⁴

Community dalam bahasa Yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari kata tersebut, Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan untuk menentukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan adalah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah tertentu yang memiliki kebudayaan dan juga sejarah yang sama.

Jadi pada dasarnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses kegiatan masyarakat yang bersifat setempat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pengalaman belajar dan secara bertahap dikembangkan pendekatan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pendelegasian wewenang dan pemberian peran yang semakin besar kepada masyarakat¹⁵. Menurut Wiku Adisasmito yang dikutip oleh Dedi Alamsyah berpendapat bahwa pemberdayaan adalah terjadinya dari empowerment. Mengandung dua pengertian, memberikan kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain atau memberi kemampuan¹⁶. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.¹⁷ Sehingga tercipta kerjasama antar masyarakat dan pemerintah untuk mencapai

¹⁴ *Ibid.*, 9

¹⁵ Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, h. 22.

¹⁶ Dedi Alamsyah, *Pemberdayaan gizi (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 5

¹⁷ Rosita Desiati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata,” *DIKLUS*, (edisi XVII, No.01, September 2001), 254

tujuan pembangunan nasional.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkup kehidupan bersama untuk melakukan pembangunan yang terarah. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan,¹⁸

Menurut Kartasmita pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁹

Salah satu upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut adalah dengan jalan pemberdayaan masyarakat, hal tersebut juga disebutkan oleh Widayanti bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan, yang dilaksanakan berbagai elemen mulai dari pemerintah,

¹⁸ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, hal- 88

¹⁹Edi Martono Dan Muhammad, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Wisata," *Ketahanan Nasional* (23, No.1,27 April 2017), 2

dunia usaha dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil. Aksi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya.²⁰ Aksi pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri²¹

2. Tahap - Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan penyadaran secara sederhana digambarkan sebagai berikut:

Tahap pertama adalah penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diperdayakan di beri pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai sesuatu, misalnya target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinanya. Program program yang dilakukan pada tahap ini

²⁰Mustangin Dkk” Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji Sosioglobal.” *Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* (No.2 vol.1), 5972

²¹pemberdayaan,hal 88

misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*,²² *belief*²³ dan *healing*²⁴. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka mampu membangun mimpi, diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari luar diri mereka).

Tahap kedua adalah pengkapasitasan dan inilah yang sering kita sebut *capacity building* atau yang dalam bahasa yang sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah seharusnya daerah-daerah yang hendaknya diotonomikan diberikan program kemampuan untuk membuat mereka cakap dalam mengelola otonomi yang diberikan.²⁵

Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restruksi mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik dan benar karena masalah tidak memadainya kecakapan daerah dalam melakukan otonomi daerah. Biaya otonomi daerah biasanya sangat mahal karena pengkapasitasan pasca pemberian otonomi bertemu dengan resistensi dan ketegangan yang seharusnya tidak terjadi. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan.

Tahap ketiga adalah cukup sederhana namun, kita tidak cakap dalam menjalankannya. Serta mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran.²⁶ Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan

²² *Kognisi* adalah keyakinan seseorang sesuatu yang didapatkan dari proses berfikir.

²³ *Belief* adalah keyakinan atau kepercayaan suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat merasa cukup atau menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai keberhasilan.

²⁴ *Healing* adalah penyembuhan

²⁵ Randy R. Wrihatnolo Dan Riant Nugroho Dwic^owijoto, *Manajemen Pemberdayaan* .,4

²⁶ *Ibid. J*

diberikan sesuatu dengan kecakapan penerima. Pemberian kredit pada suatu kelompok miskin yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapsitan masih perlu disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan usaha. Jika perputaran usahanya mampu mencapai 5 jt tidaklah diberikan pinjaman modal sebesar 50 jt.

Menurut Tim Delivery menyatakan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi lokasi/ wilayah dilakukan sesuai dengan criteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat.
- b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.
- c. Proses pemberdayaan masyarakat. Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut, masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:
 1. Kajian keadaan pedesaan partisipatif,
 2. Pengembangan kelompok,
 3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan,
 4. Monitoring dan evaluasi partisipatif.
- d. Pemandirian masyarakat Berpegang pada prinsip pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra yaitu:

a. Prinsip kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Dinamika yang dibangun adalah kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing- masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.²⁷

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan 8 pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap

²⁷ Novie Istoria Hidayah, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta," Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Di Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

pemberdayaan masyarakat.

c. Kesuwadayaan atau kemandirian

Prinsip kesuwadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk keberlanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.²⁸

4. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat

²⁸ Sri najiati dkk, (*prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat*), modul II tahun 2005, hal 54

demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.²⁹

C. Pemberdayaan Nelayan

1. Pemberdayaan Nelayan dan permasalahannya

Nelayan tradisional adalah masyarakat kecil, masyarakat miskin yang sudah ada sejak zaman dulu. Salah satu alasan kemiskinan ini adalah rendah produktivitas dan pendapatan nelayan. Secara struktur, nelayan terkungkung dalam kemiskinan³⁰. Nelayan tidak berdaya dan tidak punya kekuatan untuk keluar dari kemiskinan. Begitu miskinnya, masyarakat nelayan sering disebut kelompok miskin di antara yang miskin (the poorest of the poor). Kecuali mereka diberdayakan, ada yang mengangkat mereka berupa memberikan daya dan kekuatan dari luar mereka, maka mereka bisa keluar dari kemiskinan.

Jika tidak, kemiskinan itu akan tetap ada di antara mereka. Kemiskinan itu akan makin parah, menciptakan kemelaratan massal, dalam berbagai segi dan bidang kehidupan. Diawali dengan kemiskinan secara ekonomi, seterusnya berkembang menjadi kemiskinan dan kemelaratan sosial, budaya, hukum, dan paada akhirnya kemiskinan dalam politik. Suara mereka tidak ada harganya. Dapat dibeli dan dijual dengan harga murah. Ketika suara mereka sudah terbeli, mereka tidak ada apa-apanya lagi. Hanya hidup itu sendiri yang mereka punyai.

²⁹ Kurniasari, Netty Dyah. *Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil Menengah di Madura)*. Jurnal Neo-Bis, 2015.

³⁰Bismar himawan. *Skripsi analisis efektifitas pemanfaatan kartu kusyks dalam rangka pemberdayaan nelayan*, kota makasar, hal 10

Pemberdayaan dapat merupakan salah satu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan antara lain bermakna bahwa suatu masyarakat tersebut menjadi bagian dari pelaku pembangunan itu sendiri. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain bagaimana suatu inovasi yang lebih maju dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana budaya lokal (termasuk kearifan lokal), bagaimana pula mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan tersebut.

Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subyek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis. Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan.

Kemandirian masyarakat nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. Unsur-unsur kemandirian masyarakat

tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata kehidupan yang lebih baik.³¹

2. Sebab-sebab Kemiskinan Nelayan

Penyebab timbulnya kelangkaan sumber daya perikanan, yang kemudian mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan, kemiskinan, dan kesejahteraan merupakan sebagian dari sebab-sebab yang kompleks. Sebab-sebab yang kompleks tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu, sebab yang bersifat internal dan sebab eksternal.³²

Adapun sebab-sebab kemiskinan yang bersifat internal yang berkaitan dengan sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka ini mencakup masalah :

- a. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan.
- b. Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan.
- c. Hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh.
- d. Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan
- e. Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan
- f. Gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Sedangkan sebab-sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja yang mencakup:

³¹Bismar himawan. *Skripsi Analisis efektifitas pemanfaatan kartu Kusuka dalam rangka pemberdayaan nelayan*, kota makasar, hal 13

³²Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal. 18-19

- a. Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial.
 - b. Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara.
 - c. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran wilayah darat.
 - d. Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan
 - e. Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan.
 - f. Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen.
 - g. Terbatasnya peluang kerja di sektor nonperikanan yang tersedia di desa-desa nelayan.
 - h. Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut.
3. Fungsi dan Ruang Lingkup Kartu Kusuka

Kartu KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan) adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia. Kartu ini berfungsi sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Beberapa manfaat dari Kartu KUSUKA antara lain:

- a. Memudahkan akses transaksi online bagi individu dan bisnis di sektor kesulitan dan perikanan
- b. Memudahkan akses ke fasilitas kredit, seperti Kredit Usaha Rakyat

(KUR), yang menyediakan dukungan keuangan untuk usaha kecil di sektor tersebut.

- c. Memudahkan proses pengajuan asuransi bagi nelayan dan individu lain di industri tersebut
- d. Mengintegrasikan kartu identitas yang berbeda untuk individu yang terlibat dalam sektor masalah dan masalah, sehingga menjadi satu kartu identitas tunggal
- e. Bantuan pengumpulan data yang valid, yang menjadi dasar untuk mengakses berbagai bentuk bantuan dan dukungan di industri tersebut.

Kartu KUSUKA berlaku untuk berbagai pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, dan penyedia layanan terkait sektor perikanan. Kartu ini berlaku di seluruh Indonesia selama individu atau bisnis masih terlibat dalam masalah keuangan dan industri, dan dapat diperbarui setiap lima tahun.³³

Bagian Pertama Fungsi Pasal 2 Kartu KUSUKA berfungsi sebagai:

- a. Identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan
- b. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan
- c. Pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan.
- d. Sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Bagian kedua Ruang Lingkup kartu Kusuka Pasal 3:

³³ Layanan kependudukan sosial , kartu pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan E Kusukan <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/kartu-pelaku-usaha-bidang-kelautan-dan-perikanan-kusuka> (di akses pada hari senin, 23 Mei 2023, pukul 20.00)

- a. Peraturan Menteri ini berlaku untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
 - b. Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat meliputi:
 - 1) Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik;
 - 2) Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan;
 - 3) Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;
 - 4) Pengolah Ikan;
 - 5) Pemasar Perikanan; dan
 - 6) Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.
 - c. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk orang perseorangan atau korporasi.
4. Dasar Hukum

Gubernur Provinsi Aceh dr. H. Zaini Abdullah menegaskan komitmennya untuk melaksanakan mandat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Komitmen itu dilaksanakan bersama dengan Panglima Laot, Jaringan Kuala, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Dengan adanya kesepakatan bersama ini, diharapkan upaya menyejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Aceh bisa direalisasikan. Kesepakatan itu sendiri memuat tiga poin penting. Pertama, Pemerintah Aceh wajib membuat

kebijakan turunan UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Aceh. Kedua, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh wajib melibatkan Panglima Laot, perwakilan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam pada proses penyusunan dan penetapan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mengimplementasikan UU No 7/2016. Ketiga, Pemerintah Aceh berkomitmen mengalokasikan anggaran dalam memenuhi hak-hak dasar nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam demi kesejahteraan mereka.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.³⁴ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

Penelitian kualitatif memiliki tiga komponen utama sebagaimana dikemukakan oleh Strauss sebagai berikut:³⁵

1. Ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan.
2. Dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi.
3. Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiensi dan aspek temuan teori yang ditunjukkan. Misalnya, seseorang bisa memaparkan peninjauan luas (overview) seluruh temuan atau diskusi mendalam tentang satu bagian dari kajian.

Dari beberapa pemaparan dapat dilihat bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang melibatkan langsung peneliti ke dalam subjek

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 11

³⁵http://www.academia.edu/32993954/Metode_Penelitian_kualitatif. diakses pada tanggal 7 Juni 2018, jam 11.00.

yang diteliti. Dengan ini maka peneliti akan lebih mengetahui secara jelas bagaimana subjek penelitian yang sebelumnya. Pada intinya metode penelitian kualitatif adalah menggambarkan secara jelas apa yang peneliti temukan di lapangan. Banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi dan itu semua akan menambah kekayaan dan kedalaman dari hasil penelitian. Menurut J.R. Raco bahwa dalam penelitian setiap informasi yang didapatkan bisa saja mengubah arah penelitian, ini terjadi bahwa ada praduga dan asumsi peneliti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partisipan.³⁶

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah nelayan dimana Nelayan yang dimaksud penulis yaitu nelayan tradisional. Hal ini disebabkan Karena, banyaknya nelayan yang tidak menegenetahui pemanfaatan serta program-program pemberdayaan dari kartu E dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap kartu E Kusuka.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian dilakukan di Aceh Selatan tepatnya di kecamatan Bakongan, Bakongan timur dan kecamatan Trumon dengan pertimbangan banyaknya nelayan yang bertempat tinggal di berbagai wilayah Aceh Selatan.

³⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulanny*, . (Jakarta: PT.Gra b sindo, 2010), hal. 8

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sebagai subjek adalah yang dianggap memahami bahkan sebagai orang yang mengalami dan menjadi sasaran program.³⁷

Adapun orang-orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Aceh Selatan 1 orang
2. Panglima laot sebanyak 3 orang
3. Nelayan di Kecamatan Bakongan 7 orang
4. Nelayan di Kecamatan Bakongan Timur 7 orang
5. Nelayan di Kecamatan Trumon 7 orang

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka jumlah subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 25 orang. Dimana salah satunya adalah Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan sebanyak 1 orang. Alasan Penentuan subjek penelitian berdasarkan maksud dan tujuan penulis adalah karena Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan, panglima laot serta Nelayan dianggap dapat memberikan keterangan yang jelas serta mereka itu sebagai orang-orang yang menjadi sasaran program E Kusuka.

³⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁸

Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti.³⁹ Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperkuat dan valid hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan data terbatas pada orang tetapi juga terhadap obyek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat memahami kondisi real dari sasaran penelitian.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

³⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Op.cit, hal. 165

2. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melengkapi dan memperdalam hasil temuan data hasil pengamatan. Wawancara adalah pertemuan *face to face*, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).⁴⁰

Wawancara didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan wawancara, di mana terdiri dari sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada pihak yang menjadi objek penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan.⁴¹ Dalam hal ini, Nasution menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan langsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif pengolahan dan analisis data sudah dimulai selama proses pengumpulan data di lapangan.

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan teknik dalam memilah dan memilih data, lalu data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan dideskripsikan sebagai hasil temuan juga bermanfaat untuk pemecahan masalah dalam penelitian sehingga bisa mengambil kesimpulan. Menurut Sugiyono dalam

⁴⁰ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23

⁴¹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2018), hal.53

analisis data untuk mempermudah dalam mengolah data⁴².

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik, artinya teknik analisisnya induktif ke deduktif. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, di mana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan.⁴³

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal.277.

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta, 2006.

kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.⁴⁴

2. Penyajian data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Sampling

Teknik Sampling Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus

⁴⁴ Sukandarrumidi. *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*. Gadjah Mada University press, 2008.

kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Sementara itu menurut Burhan Bungin, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E Kusuka di Aceh Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

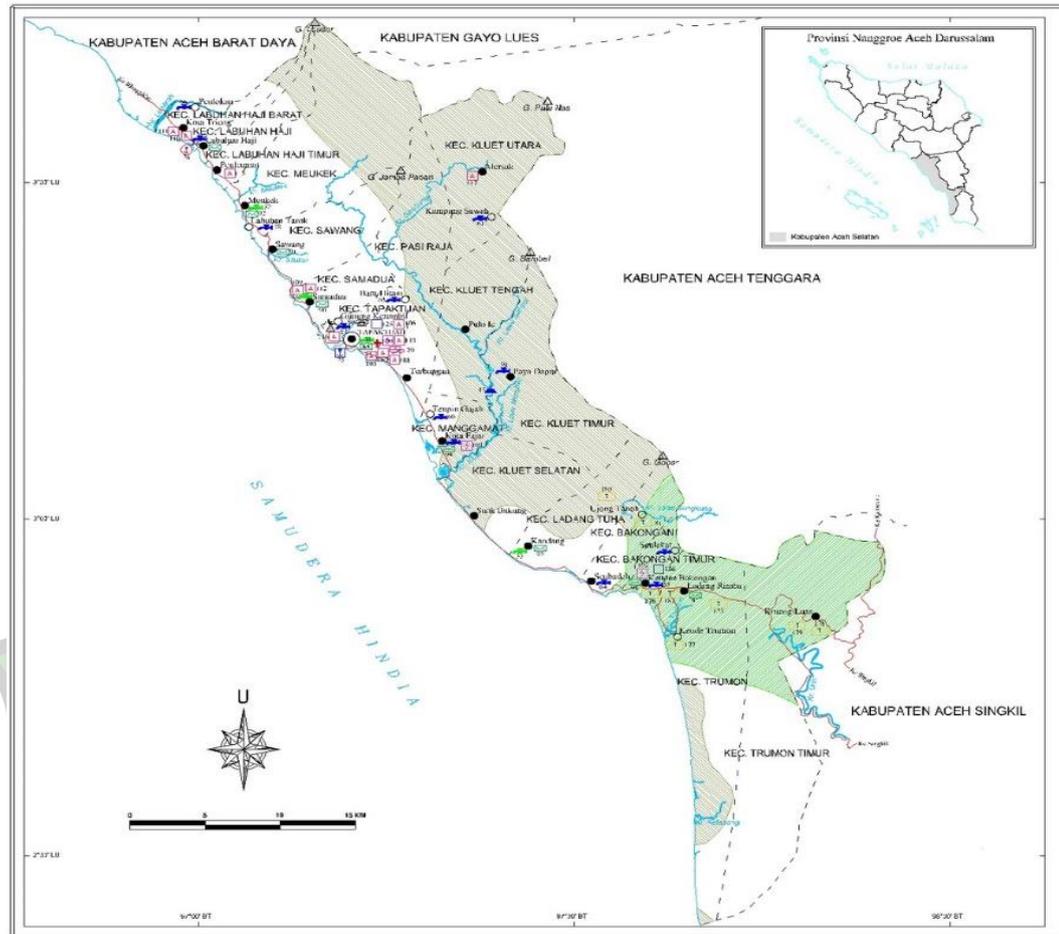
Gambaran umum lokasi Penelitian yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Selatan berada pada koordinat antara $02^{\circ} 23' 24''$ – $03^{\circ} 44' 24''$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 57' 36''$ – $97^{\circ} 56' 24''$ Bujur Timur dengan ketinggian wilayah rata-rata sebesar 25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas sebesar 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha. Kabupaten Aceh Selatan memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues.
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Sebelah barat : berbatasan dengan Samudra Hindia.
- d. Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan yang melintang dari selatan hingga utara. Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terletak di Kecamatan Tapaktuan.



Gambar 4. 1 Peta kab Aceh Selatan

Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2021 adalah sebanyak 234.630 jiwa penduduk dengan RJK (Rasio Jenis Kelamin) sebesar 100,62. Jumlah penduduk tersebut mengalami penambahan sebesar 0,95% dari tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2021 adalah sebesar 1,27%. Kabupaten Aceh Selatan memiliki kepadatan penduduk rendah yaitu 56 jiwa/Km².¹ Persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹ <https://bkpsdm.acehselatankab.go.id/> (Di akses pada: Jumat, 21 Juli 2023, pukul: 22.05)

Tabel 4. 1
Angka Kepadatan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
Trumon	6207	76.591,03	8
Trumon Timur	8710	12.350,23	71
Trumon Tengah	6836	28.534,27	24
Bakongan	5405	5.762,14	94
Bakongan Timur	6254	7.381,20	85
Kota Bahagia	7064	24.463,29	29
Kluet Selatan	14520	10.658,50	136
Kluet Timur	10709	44.902,95	24
Kluet Utara	25039	7.323,68	342
PasieRaja	18228	9.811,37	186
KluetTengah	7621	80.107,91	10
Tapak Tuan	23146	10.072,58	230
SamaDua	16153	11.290,66	143
Sawang	16141	18.937,61	85
Meukek	21149	46.506,18	45
Labuhan Haji	13495	5.482,51	246
Labuhan Haji Timur	10081	9.550,22	106
Labuhan Haji Barat	17872	7.656,10	233

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2022, 2021 (diolah)²

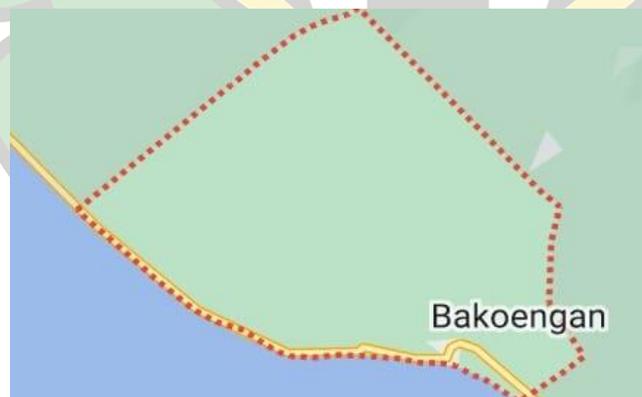
Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi yang terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam atau terjal (25% sampai >40%). Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelas dengan masing-masing lokasi sebagai berikut:

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2022, 2021

- a. Kemiringan lereng 0–8% , merupakan dataran dengan relief permukaan landai seluas 138.765,48 Ha (33,24%). Kondisi tersebut dominan berada di wilayah berombak yaitu pada Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Timur, Samadua dan Sawang.
- b. Kemiringan lereng 8–15%, merupakan wilayah landai seluas lebih kurang 14.168,60 Ha (3,39%). Bentuk permukaan bergelombang tersebar di setiap kecamatan, yang dominan terletak di Kecamatan Trumon Timur, Bakongan Timur dan Sawang.
- c. Kemiringan lereng 15–25%, merupakan wilayah bergelombang dengan kondisi kemiringan seluas 39.420,82 Ha (9,44%). Bentuk permukaan bergelombang ini tersebar di setiap kecamatan, yang dominan dijumpai di Kecamatan Kota Bahagia, Kluet Timur dan Meukek.
- d. Kemiringan lereng 25–40%, merupakan wilayah perbukitan dan curam yang tersebar di setiap kecamatan dengan luas lebih kurang 157.705,82 Ha (37,78%). Kondisi tersebut tersebar hampir di semua kecamatan yang dominan terletak di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timur dan Meukek.
- e. Kemiringan lereng >40%, merupakan wilayah pegunungan dengan bentuk permukaannya curam bervariasi terjal, umumnya dijumpai sebagai kerucut dan puncak vulkan. Wilayah pegunungan ini memiliki luas 67.319,56 Ha (16,12%) dengan penyebaran paling dominan terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timur dan Meukek.

2. Gambaran umum Lokasi kecamatan Bakongan

Kedai Bakongan adalah pusat administratif Bakongan dan terletak sekitar 54 km tenggara Tapaktuan, ibukota Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan ini memiliki luas 6398 km² dan jumlah penduduk adalah sekitar 5.443 jiwa. perekonomian yang berbasis pertanian secara fisik mengalami kelemahan oleh topografis yang alami dan kawasan hutan gambut yang mendominasi dataran rendah. Padi dan Kelapa memberikan pendapatan yang besar bagi penduduknya. di bakongan juga mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Kecamatan ini terdiri atas 2 mukim yaitu Keude Bakongan dan Ujung Padang serta 7 gampong menurut BPS dan pemda Kabupaten Aceh Selatan atau 5. Dimana dari ke-tujuh desa di bakongan timur masing-masing memiliki jumlah kartu E-kusuka sebanyak 344 orang.



Gamabar 2: kecamatan Bakoengan

3. Gambaran Umum lokasi Bakoengan timur

Bakongan Timur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas 6398 km² dan jumlah penduduk adalah sekitar 5.210 jiwa. perekonomian yang

berbasis pertanian secara fisik mengalami kelemahan oleh topografis yang alami dan kawasan hutan gambut yang mendominasi dataran rendah. Padi dan Kelapa memberikan pendapatan yang besar bagi penduduknya. di bakongan juga mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Yang terdiri dari 7 desa di antaranya: Desa pasi seubadeh, sawah tingkem, Seuleukat, ujung pulocut, ujung pulorayek, simpang dan ladang rimba seubadeh. Dimana dari ke-tujuh desa di bakongan timur masing-masing memiliki jumlah kartu E-kusuka sebanyak 266 orang.



Gambar 4: kecamatan Bakongan Timur

4. Gambaran Umum lokasi Kecamatan Trumon

Nama Keude Trumon terdiri atas dua suku kata yaitu "Keude" dan "Trumon". Menurut Abdul Hanan bahwa kata "Keude" berarti kata-kata yang telah lazim disebut oleh masyarakat Trumon, karena di Gampong Keude Trumon dulu kala sampai saat ini masih banyak terdapat rumah yang berkontruksi kayu yang terdiri dari dua lantai, kalau sekarang disebut Ruko. Adapun Keude tersebut berdiri sejajar di kiri kanan jalan. Adapun kata "Trumon" bermula sewaktu Tengku Djakfar membuka perkebunan Lada di suatu dataran sebelah Utara Singkil, beliau menemukan sebuah sumur tua dan ditepinya terdapat sebatang pohon terong yang

dalam bahasa Aceh disebut "Trueng Beneimon". Dari masa ke masa orang lebih mudah dan lebih suka menyebut nama "Trumon". Sejak itulah dataran tersebut terkenal dengan nama Trumon. Demikian cerita yang diterima secara turun temurun.

Sedangkan menurut Nur Insan, bahwa dahulu Keude Trumon merupakan salah satu Gampong yang menjadi pusat perekonomian. Pada masa itu Keude Trumon terkenal sebagai pusat perdagangan Lada, yang merupakan hasil dari daerah Trumon, selain untuk mencukupi kebutuhan dalam Gampong, Lada tersebut juga dijual keluar daerah yang diangkut langsung dengan menggunakan kapal laut. Kecamatan Trumon memiliki 12 gampong di antaranya: Keude Trumon, Kuta Baru, Kuta Padang, Pantan Bili, Raket, Seunabok Jaya, Sigleng, Teupin Tinggi, UPT II Padang Harapan, Ujong Tanoh, Ie Meudama, Gampong Teungoh.



Gambar 5 : lokasi Kecamatan Trumon

Dimana dari ke-12 gampong di Kecamatan Trumon masing-masing memiliki jumlah kartu E-kusuka sebanyak 232 orang.

5. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan

Pemerintahan di Aceh Selatan berpedoman pada prinsip otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Aceh yang memiliki kewenangan pemerintahan sendiri. Kepala pemerintahan kabupaten ini adalah seorang bupati yang dipilih melalui pemilihan umum setiap periode tertentu. Bupati bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan daerah, serta memimpin pelaksanaan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk pengambilan keputusan strategis untuk kemajuan daerah. Keduanya bekerja sama dengan Sekretariat Daerah (Setda), yang bertindak sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan dan koordinasi antar unit kerja di tingkat kabupaten. Dalam hal legislatif, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas membuat peraturan daerah serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten.

Selain itu, struktur administrasi juga mencakup Kecamatan-Kecamatan dengan Camat sebagai kepala wilayah. Camat bertanggung jawab mengurus urusan administrasi di tingkat kecamatan. Di tingkat yang lebih rendah, terdapat Desa-Desa dengan Kepala Desa sebagai pemimpinnya. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola urusan administrasi serta pembangunan di tingkat desa.

Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terletak di Kecamatan Tapaktuan. Tempat ini menjadi lokasi utama untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pengambilan keputusan pemerintahan kabupaten. Di pusat pemerintahan terdapat beberapa instansi dan lembaga penting yang berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi dan pembangunan daerah. Beberapa di antaranya adalah:

- b. Kantor Bupati: Kantor ini merupakan tempat kediaman resmi Bupati serta menjadi markas utama dari kepala eksekutif kabupaten. Di sini, Bupati menjalankan tugas-tugasnya dalam memimpin pembangunan dan mengelola urusan pemerintah daerah.
- c. Sekretariat Daerah (Setda): Sekretariat Daerah berfungsi sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan di tingkat kabupaten. Setda bertindak sebagai jembatan komunikasi antara Bupati dengan unit-unit kerja lainnya serta menyediakan dukungan teknis untuk pelaksanaan program-program daerah.
- d. Gedung DPRD: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Selatan merupakan tempat berkumpulnya anggota legislatif untuk melakukan rapat-rapat, membahas peraturan daerah, dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan pemerintahan kabupaten.
- e. Badan Kepegawaian Daerah (BKD): BKD bertanggung jawab dalam mengelola kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten. Mereka melakukan tugas-tugas seperti rekrutmen pegawai, pengaturan status

kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia.

- f. Dinas-Dinas Kabupaten: Pusat pemerintahan juga menjadi tempat beroperasinya berbagai dinas kabupaten yang terlibat dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik. Contohnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan masih banyak lagi.

Selain itu, pusat pemerintahan juga sering menjadi lokasi pertemuan penting antara pejabat daerah dengan masyarakat atau kelompok-kelompok lainnya untuk membahas isu-isu penting atau menyampaikan informasi kepada publik.³

6. Pendapatan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan

Pendapatan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan tingkat ekonomi di wilayah tersebut.

⁴Secara menyeluruh, pembahasan mengenai pendapatan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- b. Struktur Ekonomi: Kabupaten Aceh Selatan memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan pertambangan. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat.

³ <https://sippn.menpan.go.id/instansi/7467/pemerintah-kab-aceh-selatan> (Di akses pada: Jumat, 21 Juli 2023, pukul: 22.30)

⁴ <https://acehselatankab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> (Di akses pada: Jumat, 21 Juli 2023, pukul: 22.40)

- c. Pertanian: Pertanian menjadi salah satu sektor utama perekonomian di Kabupaten Aceh Selatan. Petani lokal mengandalkan hasil panen seperti padi, kelapa sawit, karet, cengkih, dan kakao untuk mendapatkan pendapatan mereka.
- d. Perikanan: jumlah nelayan di Kabupaten Aceh Selatan dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu nelayan tetap dan nelayan sambilan. Jumlah nelayan di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2018 sejumlah 7.406 jiwa yang didominasi oleh nelayan tetap sejumlah 6.885 jiwa dan nelayan sambilan sejumlah 521 jiwa. Jumlah Nelayan di Kecamatan Pesisir yang berpotensi dapat mengakses KKPD Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan data BPS diperkirakan sejumlah 6.408 jiwa meliputi nelayan dari Kecamatan Trumon, Bakongan Timur, Bakongan, Tapaktuan, Samadua, Meukek, Sawang, Labuhan Haji Timur dan Labuhan Haji. Dengan posisi geografisnya yang dekat dengan pantai dan memiliki sumber daya laut yang melimpah, perikanan menjadi sektor penting dalam perekonomian kabupaten ini. Masyarakat memperoleh pendapatan dari penangkapan ikan serta budidaya ikan air tawar maupun air laut seperti udang dan bandeng.
- e. Perdagangan: Kegiatan perdagangan juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan Melalui pasar tradisional maupun pusat dunia modern , para pedagang lokal dapat menjual barang dagangan mereka untuk mendapatkan penghasilan.

- f. Pariwisata : Potensi pariwisata juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan. Wisata alam seperti pantai-pantai yang indah dan warisan budaya seperti Masjid Tua atau Benteng Indra Patra menjadi daya tarik bagi wisatawan, yang berkontribusi pada pendapatan lokal melalui sektor pariwisata.
- g. Pertambangan : Keberadaan tambang emas juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian warga. Pendapatan dari aktivitas pertambangan memberikan kontribusi penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Tingkat pendapatan masyarakat dapat bervariasi antara individu dan kelompok, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan, akses ke lapangan usaha yang layak, serta kesempatan mikro dan kecil. Pemerintah kabupaten bersama instansi terkait perlu melakukan upaya untuk meningkatkan potensi sektor ekonomi yang ada serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan program-program pembangunan ekonomi inklusif.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E Kusuka merupakan program kartu bagi nelayan yang digunakan sebagai identitas dan dapat digunakan untuk menerima bantuan, pembuatan kelompok, dan akses ke program-program pemerintah yang lainnya. Program ini merupakan salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Kartu E Kusuka juga dapat memudahkan pelaku usaha

kesulitan dan kesulitan dalam mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengikuti program KKP seperti BPAN, SeHAT Nelayan dan APPIK, serta dalam pengusulan dan pengambilan kuota BBM Bersubsidi. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka di Aceh Selatan yang diteliti pada 3 kecamatan (Kec Bakongan, Kec Bakongan Timur, dan Kec Trumon), yaitu mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pemanfaatan Kartu E Kusuka

Program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan kartu E Kusuka merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi para nelayan. Kartu E Kusuka merupakan sebuah alat pembayaran elektronik yang dirancang khusus untuk memudahkan transaksi keuangan para nelayan, tidak hanya di Aceh Selatan saja tetapi seluruh Indonesia yang mana Kartu E Kusuka tersebut di terbitkan oleh kementerian kelautan dan perikanan.

Dengan adanya program tersebut, diharapkan para nelayan akan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap bantuan sosial dan layanan keuangan seperti tabungan serta pinjaman mikro. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi toksistas dan memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Wawancara dengan ketua KNTI Aceh Selatan, selaku penanggung jawab pemberdayaan nelayan di Aceh Selatan menjelaskan bahwa “Kartu E-kusuka pertama kali diterbitkan dan dibuat pelatihan di Aceh Selatan pada akhir 2021

dengan direkrut pengurus KNTI sebagai relawan operator. Tujuan kartu E Kusuka yaitu sebagai identitas bagi nelayan seperti KTP, kemudian untuk databes kementerian sebagai acuan untuk membuat program oleh pihak BPDP. Kriteria yang mendapatkan Kartu E Kusukan terdapat 5 spesifikasi yaitu nelayan tangkap, budidaya ikan, tambak garam, pedagang ikan, pengolah ikan. Cara untuk mendapatkan kartu E Kusuka yaitu sesuai dengan 5 kriteria yang di jelaskan di atas, membawa KK, kemudian wajib KTP nelayan atau membuat surat rekom berprofesi sebagai nelayan. Ada beberapa Program melalui kartu E Kusukan yang mencakup bantuan sosial, pelatihan, akses permodalan, pengembangan infrastruktur, dan pemasaran hasil penangkapan ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) membuat program untuk memberdayakan nelayan melalui kelompok usaha bersama atau KUB. Ada beberapa jenis KUB yang diberdayakan oleh KNTI, seperti, pengolahan hasil perikanan, pembenihan ikan, penangkapan ikan skala kecil, dan pembuatan alat tangkap tradisional. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan dengan cara meningkatkan produksi dan nilai tambah dari sektor perikanan.”⁵

⁵ Wawancara dengan jerry rahmad ketua KNTI Aceh Selatan, Pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2023



Gamabr 4. 1 Kartu E kusuka dari depan



Gamabr 4. 2 Kartu E Kusuka dari belakang

Program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan kartu E-Kusuka memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat peran nelayan dalam sektor perikanan. Dengan menggunakan Kartu E-Kusuka sebagai alat pengenalan resmi, program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada para nelayan terhadap bantuan, fasilitas, dan peluang yang disediakan oleh pemerintah.

Salah satu manfaat utama dari program ini adalah memudahkan pemegang kartu dalam mengakses berbagai kebijakan dan program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat nelayan. Misalnya, dengan adanya Kartu E-Kusuka, nelayan dapat lebih mudah mendapatkan bantuan modal usaha atau permodalan bagi kelompok-kelompok usaha perikananannya.

Selain itu, Kartu E-Kusuka juga menjadi data dasar yang akurat tentang populasi nelayan di suatu daerah. Data ini akan digunakan oleh badan-badan pemerintahan terkait seperti BPDP (Badan Pengelola Dana Pembiayaan Perikanan) untuk merencanakan program-program pengembangan sektor perikanan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap wilayah. Dalam rangka mendapatkan Kartu E-Kusuka, calon pemegang kartu harus memenuhi lima kriteria spesifik yaitu menjadi nelayan tangkap, budidaya ikan, pembudidaya ikan, petambak garam, pedagang ikan, pengolah ikan, dan pengusaha jasa.

Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pemanfaatan Kartu E-Kusuka memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Dengan adanya kartu ini, diharapkan para nelayan dapat lebih mudah mengakses bantuan dan peluang yang disediakan oleh pemerintah serta memperoleh pengakuan yang lebih formal atas profesi mereka.

Untuk mengatasi kendala tersebut pihak KNTI Aceh Selatan perlu mengevaluasi program secara menyeluruh guna mengidentifikasi kekurangan dan hambatan dalam implementasinya. Dalam hal ini, melibatkan pihak-pihak terkait seperti BPDP dan instansi pemerintah menjadi langkah penting agar program perbaikan dapat dilakukan secara kolaboratif. Perluasan manfaat dari Kartu E-Kusuka juga patut dipertimbangkan. Selain bantuan finansial, pendampingan teknis, pelatihan kewirausahaan, akses pasar yang lebih luas, atau penyediaan sarana produksi lainnya dapat diperluas sebagai manfaat tambahan bagi para nelayan. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan

mereka.

Komunikasi aktif dengan pemegang kartu maupun seluruh jaringan nelayan juga merupakan langkah penting dalam penyelesaian masalah ini. Komunikasi yang transparan tentang program-program baru atau perubahan aturan akan memberikan pemahaman yang baik kepada pemegang kartu mengenai manfaat dan prosedur penggunaannya. Peningkatan infrastruktur juga tidak boleh diabaikan dalam upaya mendukung kegiatan nelayan. Perbaikan akses jalan menuju pelabuhan atau pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil tangkapan akan membantu meningkatkan efisiensi serta nilai tambah produk mereka.

Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan harus dilakukan untuk mengukur dampak program Kartu E-Kusuka secara objektif. Dari hasil evaluasi tersebut, perbaikan yang diperlukan dapat diimplementasikan agar program-program lebih efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan mengenai program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan Kartu E-Kusuka di Aceh Selatan, program Kartu E-Kusuka telah diterbitkan dan dilakukan pelatihan pada akhir tahun 2021 dengan melibatkan pengurus KNTI sebagai operator relawan. Tujuan dari kartu ini adalah untuk menjadi identitas bagi nelayan seperti KTP serta digunakan sebagai database oleh pengadilan dalam menyusun program-program yang berkaitan dengan sektor perikanan oleh BPDP.

Program pemberdayaan masyarakat nelayan di Aceh Selatan melalui pemanfaatan Kartu E-Kusuka mencakup beberapa aspek. Pertama, ada bantuan

sosial yang dapat berupa subsidi bahan bakar atau alat tangkap ikan guna membantu pembinaan usaha para nelayan. Kedua, terdapat program pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan mengenai teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan efisien. Ketiga, akses permodalan juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan kemampuan ekonomi para nelayan sehingga mereka dapat melakukan budidaya ikan atau tambak garam secara lebih baik.

Selain itu, pengembangan infrastruktur juga merupakan langkah penting dalam memperkuat sektor perikanan di daerah tersebut. Dengan pembangunan pelabuhan atau jaringan listrik di daerah pesisir, para nelayan akan mendapatkan fasilitas yang mendukung aktivitas mereka. Terakhir, upaya pemasaran hasil tangkapan ikan juga sangat dibutuhkan agar produk-produk mereka memiliki nilai jual tinggi dan bisa diakses oleh pasar yang lebih luas.

Meskipun demikian, terdapat kendala dalam implementasi program Kartu E-Kusuka di Aceh Selatan. Salah satunya adalah kesulitan nelayan dalam mendapatkan bahan bakar untuk melaut karena aturan pembelian di SPBU tidak mengakomodasi penggunaan Kartu E-Kusuka sebagai identitas nelayan. Hal ini menjadi hambatan nyata bagi para nelayan untuk memperoleh manfaat dari program tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara pihak KKP atau KNTI dengan instansi terkait seperti SPBU agar aturan pembelian bahan bakar dapat disesuaikan dengan penggunaan Kartu E-Kusuka sebagai identitas nelayan. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat

tentang manfaat dan prosedur penggunaan Kartu E-Kusuka agar lebih banyak nelayan yang memiliki kartu tersebut.

Dengan adanya langkah-langkah ini serta dukungan dari berbagai pihak termasuk partisipasi aktif dari para nelayan itu sendiri, diharapkan pemberdayaan program-program melalui pemanfaatan Kartu E-Kusuka dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat nelayan di Aceh Selatan.

2. Bagaimana tantangan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E Kusuka Nelayan di Aceh Selatan.

Kartu E-Kusuka bertujuan untuk para nelayan agar memperoleh berbagai manfaat seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, informasi pasar ikan dan perikanan, serta akses ke lembaga pembiayaan atau bank. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan para nelayan dapat meningkatkan produktivitas usaha mereka sehingga pendapatan juga akan meningkat.

Berdasarkan pernyataan beberapa nelayan di Aceh Selatan dari setiap kecamatan yang di teliti mengenai realisasi program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka dalam mendukung fasilitas usaha nelayan di Aceh Selatan. Yang pertama wawancara yang dilakukan dengan nelayan yang berasal dari kecamatan Trumon yaitu Bapak Miswar yang mengatakan bahwa “Belum ada program yang terealisasi bagi pemegang Kartu E Kusuka di daerah kami. Padahal, masyarakat nelayan sangat membutuhkan program-program yang

dapat membantu kami menjadi nelayan yang lebih sukses.”⁶

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Nasruddin selaku nelayan mengatakan bahwa “sepertinya program Kartu E Kusuka belum memberikan manfaat bagi para nelayan seperti kami. Pertama-tama, tidak jelas apakah program ini ditujukan untuk semua pemegang kartu E Kusuka atau tidak. Kami pun merasa cemas karena situasi kami sebagai nelayan sedang sulit saat ini. Kami kesulitan mendapat BBM untuk melaut karena aturan di SPBU, dan ketika kami memperlihatkan kartu E Kusuka kepada pihak SPBU, mereka mengatakan belum ada kerja sama, sehingga para nelayan harus membeli di BBM di enceran dengan harga yang relative lebih mahal.”⁷ Bapak Amar selaku Nelayan mengatakan bahwa “Saya melaut baru-baru ini sekitar lima bulan, dulu saya jualan sama berkebun, saya tau kartu E Kusuka karna saya memilikinya tetapi untuk program-programnya saya kurang tau, dengar dari orang-orang saja pernah kalau kartu tersebut bisa digunakan untuk administrasi nelayan untuk kalau yang lain saya kurang tau”.⁸ Bapak Muhammad Ali juga berpendapat “saya kurang tau masalah program kartu E Kusuka, punya kartu itu pun karna katanya semua nelayan disuruh buat”⁹.

Begitu pula wawancara yang dilakukan dengan dengan beberapa nelayan dari kecamatan Bakongan yang juga memiliki kartu E Kusuka mengatakan “saat

⁶ Wawancara dengan bapak Miswar selaku Nelayan di Kec Trumon, Aceh Selatan, Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023

⁷ Wawancara dengan bapak Nasruddin selaku Nelayan di Kec Trumon, Aceh Selatan, Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023

⁸ Wawancara dengan bapak amar selaku Nelayan di Kec Trumon, Aceh Selatan, Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023

⁹ Wawancara dengan bapak muhammad ali selaku Nelayan di Kec Trumon, Aceh Selatan, Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023

ini kami belum merasakan manfaat nyata dari Program Kartu Kusuka yang seharusnya membantu kami para nelayan. Kami berharap keluhan-keluhan kami didengar oleh pemerintah dan ada solusi yang dapat membantu dalam kondisi sulit seperti ini.¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhajirin, beliau mengatakan “saya tau mengenai program-program dari E Kusuka yang di sosialisasikan oleh pihak KNTI tetapi untuk penerapannya belum ada yang terealisasi, mungkin dikarenakan kurangnya dana atau ada sebab lainnya, kami sendiri sebagai nelayan berharap ada tindakan pihak KNTI agar dengan adanya kartu E Kusuka tersebut dapat membantu kami para nelayan, setidaknya dalam hal bantuan bahan bakar subsidi untuk bot.¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Buduman, beliau mengatakan “Kartu E Kusuka tersebut di peruntukkan untuk nelayan, tetapi saya rasa untuk saat ini belum ada fungsi dari kartu tersebut yang ada kami harus membayar iuran setiap bulan ke pihak BPJS di karenakan BPJS bisa membantu para nelayan ketika ada musibah atau kecelakaan di laut.¹²

Dan juga wawancara yang dilakukan dengan dengan para nelayan dari kecamatan Bakongan Timur yang juga memiliki kartu E Kusuka mengatakan Hasil wawancara dengan bapak iswadi, beliau mengatakan “Kami tidak merasakan manfaat dari program pemerintah, baik dari E Kusuka maupun lainnya. Masih banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM. Selain itu, ada juga peraturan yang melarang petani dan nelayan membeli BBM menggunakan jeriken, sehingga

¹⁰ Wawancara dengan bapak Rahmadi selaku Nelayan di Kec Bakongan, Aceh Selatan, Pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023

¹¹ Wawancara dengan bapak muhajirin selaku Nelayan di Kec Bakongan, Aceh Selatan, Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023

¹² Wawancara dengan bapak budiman selaku Nelayan di Kec Bakongan, Aceh Selatan, Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023

mempersulit nelayan dalam mendapatkan subsidi BBM.¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Hussaini yang juga selaku Nelayan, beliau mengatakan “Tidak tau saya tentang program tersebut, dan saya tidak memiliki kartu tersebut, saya sendiri melaut dikarenakan di ajak oleh kawan saya karena saya suka memancing.”¹⁴

Wawancara dengan Panglima Laot lhok pasie seubadeh Bapak Bahri Dolah selaku pelaku usaha kelautan dan perikanan di Aceh Selatan mengatakan “Belum ada program yang ditawarkan bagi pemegang Kartu E Kusuka. Saat ini, nelayan kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut karena tidak bisa membeli di SPBU karena adanya aturan, dan Kartu E Kusuka sebagai identitas nelayan tidak diterima. Oleh karena itu, saat ini belum ada manfaat yang diperoleh nelayan dari program Kartu E Kusuka.”¹⁵

Bagi para nelayan di Aceh Selatan, program Kartu E Kusuka belum memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung usaha mereka. Mereka merasa cemas karena situasi yang sulit dihadapi sebagai nelayan saat ini. penolakan mendapatkan BBM untuk melaut menjadi salah satu masalah utama yang mereka hadapi.

Aturan di SPBU juga mempersulit para nelayan ketika ingin menggunakan kartu E Kusuka sebagai identitas pembelian BBM subsidi. Pihak SPBU menyatakan bahwa belum ada kerja sama dengan program tersebut, sehingga nelayan tetap harus membeli BBM dengan harga lebih mahal di tempat lain.

¹³ Wawancara dengan bapak Iswadi selaku Nelayan di Kec Bakongan Timur, Aceh Selatan, Pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023

¹⁴ Wawancara dengan bapak hussaini selaku Nelayan di Kec Bakongan Timur, Aceh Selatan, Pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023

¹⁵ Wawancara dengan bapak Bahri dolah Panglima Laot lhok pasie seubadeh, Pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2023

Selain itu, larangan penggunaan jeriken sebagai pembelian wadah BBM bersubsidi juga meningkatkan kesulitan para nelayan dalam mengakses subsidi tersebut. Hal ini membuat mereka merasa bahwa program pemerintah masih belum optimal dalam memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Nelayan-nelayan tersebut berharap agar keluhan dan aspirasi mereka didengar oleh pemerintah dan solusi konkret dapat ditemukan untuk membantu kondisi sulit yang dihadapi oleh komunitas nelayan. Diharapkan adanya upaya nyata untuk meningkatkan efektivitas program-program bantuan serta penyediaan akses yang mudah terhadap subsidi BBM bagi para nelayan Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan masih banyak sekali tantangan program pemberdayaannya di hadapi terhadap masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka di aceh selatan. Diantaranya masih banyak nya Masyarakat nelayan yang masih kesulitan untuk mengaplikasikan kartu E-kusuka untuk menunjang perekonomian mereka dalam mencari ikan. Maka dari sinilah Nelayan mengharapkan agar keluhan mereka didengar oleh pemerintah dan ada solusi yang dapat membantu para nelayan dalam kondisi sulit seperti ini.

3. Bagaimana realitas program pemberdayaan Kartu E Kusuka di Aceh Selatan.

Program E-Kusuka yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan pelaku industri kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat nelayan di Aceh Selatan. Program ini menyediakan Kartu E Kusuka yang berisi informasi identitas dan digunakan sebagai database untuk menentukan kebijakan terkait perlindungan

dan pemberdayaan pelaku industri kelautan dan perikanan. Program ini juga memberikan manfaat seperti akses pembiayaan, partisipasi dalam program KKP, dan asuransi bagi nelayan.

Begitu pula wawancara yang dilakukan dengan beberapa nelayan tangkap di Trumon mengenai Realisasi program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka, Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, beliau mengatakan “Mungkin proses implementasinya masih berjalan atau mungkin memang ada kendala sehingga programnya tidak terealisasi. Tetapi terdapat pemberdayaan lain yang dilakukan oleh para panglima laot yaitu adanya program beasiswa untuk anak-anak nelayan per desa sekitar 3 orang dalam setahun. Meskipun ini bukan program langsung dari Kartu E Kusuka, tapi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut adalah memiliki kartu E Kusuka.”¹⁶

Pada hasil wawancara lanjutan mengenai realitas program melalui kartu E-Kusuka untuk pemberdayaan para nelayan, terdapat beberapa keluhan dari sebagian diantaranya, Hasil wawancara dengan Bapak Zarkalis “Ada dibentuk kelompok nelayan untuk usaha pengolahan ikan entah namanya saya lupa, awalnya kami sudah sangat senang sekali di saat banyak hasil tangkapan kami bisa mengolahnya setengah dan menjualnya setengah tetapi hingga saat ini belum ada program lanjutan dari kelompok yang sudah terbentuk tersebut”¹⁷

Hasil wawancara lanjutan dengan nelayan dari Bakongan timur terkait Realisasi program Kartu E Kusuka, Hasil wawancara dengan Bapak Lahmuiddin

¹⁶ Wawancara dengan Nelayan Trumon, Bapak Rusli di Aceh Selatan, Pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023

¹⁷ Wawancara dengan bapak zarkalis selaku Nelayan di Kec trumon, Aceh Selatan, Pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023

beliau mengatakan bahwa “Untuk pihak nelayan tangkap belum ada realisasi saya rasa, nelayan setau saya mandiri dengan modal pribadi, saya pun demikian kalau berharap sama pemerintah ya maunya di bantu tapi saya sudah tidak terlalu berharap”¹⁸, Hasil wawancara dengan Bapak Budiman beliau mengatakan “Tidak ada Realisasi program yang saya terima apalagi realisasi program jangka panjang, sepanjang saya melaut sekitar tahun 2015 saya dapat bantuan jaring itu Cuma sekali, kalau dari program kartu kusuka ini tidak ada, informasi pun tidak pernah saya dengar”¹⁹, Hasil wawancara dengan Bapak Munzakar, beliau juga menuturkan “Realisasi program mungkin ada tapi tidak untuk kami, saya tidak pernah dapat apapun, yang minta data banyak katanya akan di bantu, sampai sekarang apa yang dapat dari jeri payah sendiri rezeki ya itu, ya kalau ngak ya tidak ada, yang udah bener Cuma dari keringat sendiri”²⁰.

Hasil wawancara lanjutan dengan nelayan dari Bakongan terkait Realitas program Kartu E Kusuka, Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, beliau mengatakan “Harusnya sih ada realisasi program apa lagi untuk nelayan seperti Saya yang sepatutnya di bantu karna masih sangat tradisional, Orang sudah pakai mesin saya masih perahu dayung, tapi karna tidak ada realisasi apapun makanya saya tidak terbantu”²¹, Hasil wawancara dengan Bapak Safdar, beliau juga mengatakan “Realisasi program dari pemerintah tidak ada sama sekali saya dapat,

¹⁸ Wawancara dengan bapak Lahmuiddin selaku Nelayan di Kec Bakongan timur, Aceh Selatan, Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023

¹⁹ Wawancara dengan bapak Budiman selaku nelayan di Kec Bakongan timur, Aceh selatan, pada hari senin tanggal 10 juli 2023

²⁰ Wawancara dengan bapak Munzakar selaku nelayan di Kec Bakongan timur, Aceh selatan, pada hari senin 10 juli 2023

²¹ Wawancara dengan bapak Hasan selaku nelayan di Kec Bakongan, Aceh selatan, pada hari jumat, tanggal 14 juli 2023

nelayan pekerjaan yg sangat beresiko mestinya memang harus di perhatikan, setahun satu program saja pun bisa ngak usah banyak- banyak”²².

Hasil wawancara dengan Bapak T M Nazmin selaku kepala desa sekaligus Nelayan, beliau mengatakan bahwanya“ Saya nelayan sekaligus kepala desa disini merasa miris melihat kondisi nelayan kampung kami, tidak ada program yang terealisasi dari pemerintah padahal selaku kepala desa sudah sering sekali kami dari forum kuchik mengaspirasikan keluhan para nelayan, namun hasilnya masih nihil, belum lagi nelayan kesulitan mendapat ikan akibat adanya nelayan dari luar melakukan pengeboman ikan di daerah kami sehingga dari ikan, bibitnya sampai karang pun mati dan hancur,tambah lagi perubahan iklim yg tidak menentu yang juga menjadi masalah buat nelayan, jadi memang sudah komplit sekali masalahnya, tinggal kita tunggu jalan keluar dari pemangku kebijakan di daerah kami.”²³ Mengenai kartu E-Kusuka untuk pemberdayaan para nelayan, terdapat beberapa keluhan dari nelayan yang menyatakan bahwa program ini belum memberikan dampak yang signifikan.

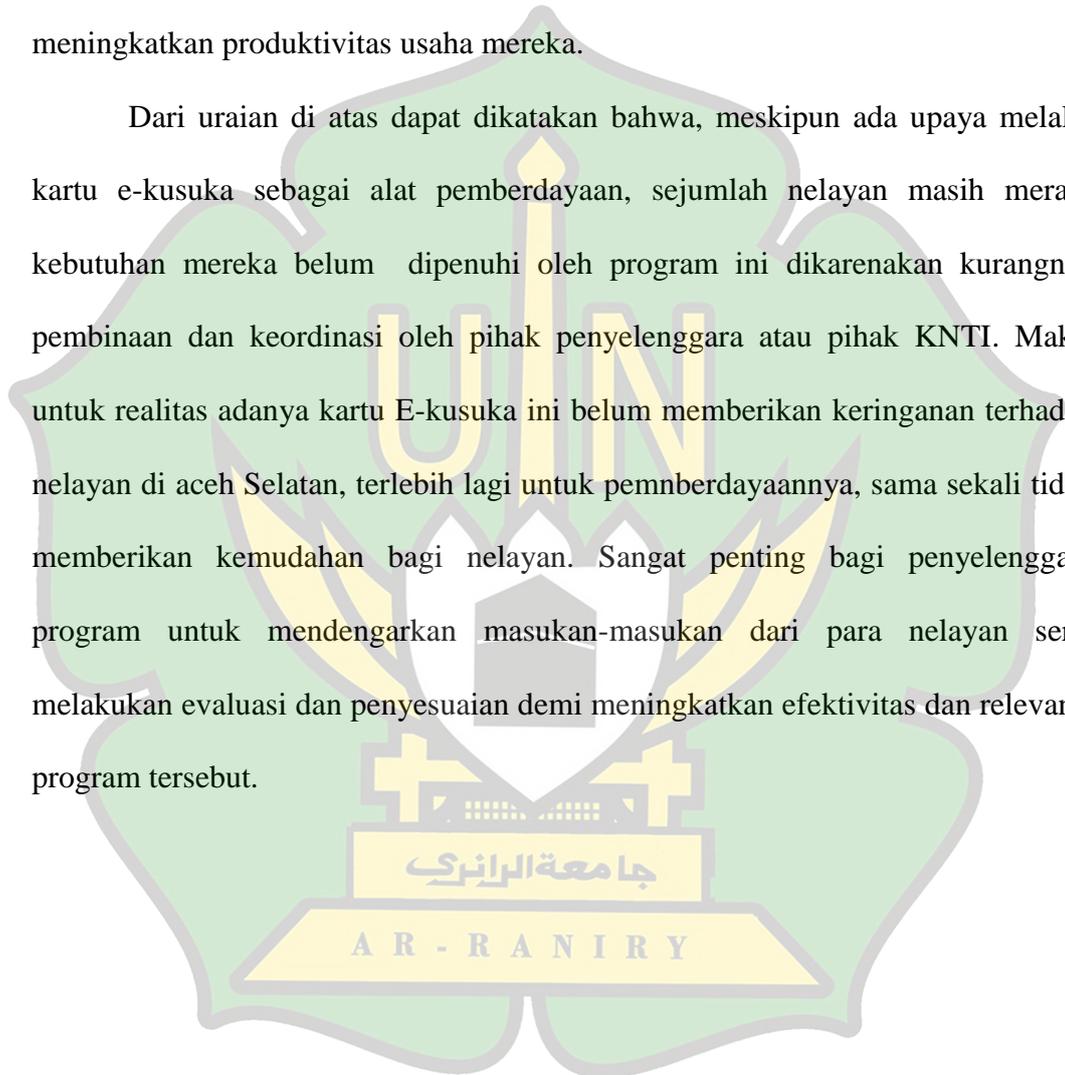
Beberapa nelayan tampak merasa bahwa manfaat yang diperoleh dari program ini masih terbatas dan kurang memadai. Mereka berpendapat bahwa akses informasi mengenai program ini masih belum jelas dan adanya keterbatasan dalam pemahaman tentang cara penggunaannya dengan optimal. Selain itu, masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil di beberapa daerah di Aceh Selatan juga menjadi kendala dalam menggunakan layanan kartu e-kusuka.

²² Wawancara dengan bapak Safdar selaku nelayan di Kec Bakongan, Aceh selatan, pada hari jumat, tanggal 14 juli 2023

²³ Wawancara dengan bapak TM nazmin kepala desa sekaligus nelayan di Kec Bakongan,Aceh selatan, pada hari jumat, tanggal 14 juli 2023

Para nelayan juga menyampaikan harapan mereka agar program ini dapat memberikan pendampingan intensif dalam aspek-aspek pengelolaan usaha dan pemasaran produk. Mereka percaya bahwa bantuan fisik seperti bibit ikan atau pakan ternak perlu didukung dengan pembinaan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa, meskipun ada upaya melalui kartu e-kusuka sebagai alat pemberdayaan, sejumlah nelayan masih merasa kebutuhan mereka belum dipenuhi oleh program ini dikarenakan kurangnya pembinaan dan keordinasi oleh pihak penyelenggara atau pihak KNTI. Maka, untuk realitas adanya kartu E-kusuka ini belum memberikan keringanan terhadap nelayan di Aceh Selatan, terlebih lagi untuk pemnberdayaannya, sama sekali tidak memberikan kemudahan bagi nelayan. Sangat penting bagi penyelenggara program untuk mendengarkan masukan-masukan dari para nelayan serta melakukan evaluasi dan penyesuaian demi meningkatkan efektivitas dan relevansi program tersebut.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang penelitian yang telah peneliti lakukan terkait program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka di Aceh Selatan dapat disimpulkan:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pemanfaatan Kartu E Kusuka

Program Kartu E-Kusuka di Aceh Selatan memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Program ini mencakup bantuan sosial, pelatihan, akses permodalan, pengembangan infrastruktur, dan pemasaran hasil penangkapan ikan.

Namun, ada kendala dalam pelaksanaan program ini terutama kesulitan terkait nelayan dalam mendapatkan bahan bakar karena aturan pembelian di SPBU tidak mengakomodasi penggunaan Kartu E-Kusuka sebagai identitas nelayan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi antara BPDP dan instansi terkait seperti SPBU agar aturan pembelian bahan bakar dapat disesuaikan dengan penggunaan kartu ini.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan prosedur penggunaan Kartu E-Kusuka sehingga lebih banyak nelayan yang dapat memperoleh kartu tersebut. Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk partisipasi aktif para nelayannya sendiri, diharapkan program-program melalui pemanfaatan Kartu E-Kusuka dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat nelayan di Aceh Selatan.

2. Bagaimana tantangan Program terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E Kusuka Di Aceh Selatan.

Tantangan Program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka di Aceh Selatan masih banyak sekali kesulitan yang dihadapi masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka di Aceh Selatan. Diantaranya masih banyak nya Masyarakat nelayan yang masih kesulitan untuk mengaplikasikan kartu E-kusuka serta kendala yang dihadapi antara lain akses informasi tentang program yang masih belum jelas dan pemahaman tentang penggunaannya secara optimal, untuk menunjang perekonomian mereka dalam mencari ikan. Maka dari sinilah Nelayan mengharapkan agar keluhan mereka didengar oleh pemerintah dan ada solusi yang dapat membantu para nelayan dalam kondisi sulit seperti ini.

Para nelayan merasa cemas dan kesulitan mengakses BBM untuk melaut karena larangan penggunaan jeriken sebagai wadah pembelian BBM bersubsidi juga menjadi hambatan bagi para nelayan dan juga peraturan di SPBU serta kurangnya kerja sama antara program Kartu E Kusuka dengan pihak SPBU.

Terus di sampaikan bahwa Para nelayan berharap agar keluhan dan aspirasi mereka didengar oleh pemerintah, sehingga solusi konkret dapat ditemukan untuk membantu kondisi sulit yang mereka hadapi. Diperlukan banyak upaya nyata dari pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program-program bantuan serta penyediaan akses mudah terhadap subsidi BBM bagi para nelayan Aceh Selatan.

3. Bagaimana Realitas Program Pemberdayaan Kartu E Kusuka di Aceh Selatan.

Realitas Program melalui E Kusuka belum sepenuhnya dapat memberdayakan masyarakat nelayan di Aceh Selatan. Terdapat banyak keluhan dari masyarakat nelayan yang menyatakan bahwa dampak yang diberikan oleh program ini masih terbatas dan kurang memadai. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun ada upaya melalui kartu e-kusuka sebagai alat pemberdayaan, sejumlah nelayan masih merasa kebutuhan mereka belum dipenuhi oleh program ini dikarenakan kurangnya pembinaan dan koordinasi oleh pihak penyelenggara atau pihak KNTI.

Maka, untuk realitas adanya kartu E-kusuka ini belum memberikan keringanan terhadap nelayan di Aceh Selatan, terlebih lagi untuk pemnberdayaannya, sama sekali tidak memberikan kemudahan bagi nelayan. Sangat penting bagi penyelenggara program untuk mendengarkan masukan-masukan dari para nelayan serta melakukan evaluasi dan penyesuaian demi meningkatkan efektivitas dan relevansi program tersebut.

Selain itu, para nelayan juga mengharapkan pendampingan yang intensif dalam aspek-aspek pengelolaan usaha dan pemasaran produk dan hal yang sekiranya dibutuhkan oleh Masyarakat. Namun implementasinya masih memiliki tantangan tersendiri. Diperlukan langkah-langkah tambahan agar program ini benar-benar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat nelayan di daerah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan berfokus daerah lain di Aceh agar dapat dilihat sejauh mana program kartu E Kusukan dalam memberdayakan masyarakat nelayan yang ada di Aceh.
2. Di harapkan kepada pihak KKP dan KNTI agar adanya sosialisasi yang masif tentang manfaat dan prosedur penggunaan Kartu E-Kusuka perlu ditingkatkan secara intensif kepada masyarakat nelayan di Aceh Selatan. Media kampanye sosial, workshop atau pelatihan langsung dapat menjadi metode efektif untuk menyebarkan informasi tentang program ini.
3. Untuk para nelayan di Aceh Selatan, diharapkan agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan terkait perikanan, menjalin kerjasama dengan sesama nelayan untuk saling bertukar informasi dan membangun kelompok usaha bersama, diversifikasi produk dengan mencoba metode penangkapan yang berbeda atau menjelajahi pasar baru, dan bergabung dalam asosiasi nelayan lokal untuk mendapatkan dukungan dan representasi kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Senja Mayangsari, *Kajian Kesejahteraan Masyarakat*, (Jawa Tengah: Fkip UMP, 2017) *Belief* adalah keyakinan atau kepercayaan suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat merasa cukup tau dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai keberhasilan.
- Bismar Himawan, (Analisis Pemanfaatan Kartu Kusuka Dalam Rangka Kesejahteraan Nelayan) Kota Makasar
- Bismar Himawan, *Analisis Efektivitas Pemanfaatan Kartu Kusuka dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan di Kota Makasar*, Makasar: 2021
- David Z. *Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan pada Desa Pasar Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Bara*, (Bandar Lampung: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017)
- Dedi Alamsyah, *Pemberdayaan Gizi (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)
- Edi Martono Dan Muhammad, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Wisata," *Ketahanan Nasional* (23, No.1,27 April 2017)
- Elly M, Uman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta:1998)
- Gunsu Nurmansyah dkk, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Bandar Lampung: CV: Anugrah Utama Raharja 2019)
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2018)
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)
- Johi Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Kognisi* adalah keyakinan seseorang sesuatu yang didapatkan dari proses berfikir
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003).

- Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007)
- Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007)
- Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung 2016
- Mustangin Dkk” *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji Sosioglobal.*” *Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* (No.2 vol.1), 5972
- Novie Istoria Hidayah,” *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*, “Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
- Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global Bandung*: Alfabeta Cv, 2014 Ke-2
- Randi R. urihato lono dan rian nugroho dwi jowojoto, *manajemen pemberdayaan* Jakarta: PT. Elek Media Kompentindo, 2007
- Randy R.Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwi^owijoto, *Manajemen Pemberdayaan 4*
- Ririn Marini, *Analisis Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya*, (Meulaboh, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar, 2013)
- Rosita Desiati,,”*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata*,” *DIKLUS*, (edisi XVII, No.01,September 2001)
- Sabtimarlia, “*pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata*”, dikutip dalam skripsi, universitas negeri Yogyakarta
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

<https://news.detik.com/berita/2605821/ini-visi-misi-jokowi-jk-soal-pembangunan-maritim-indonesia?9922032>=Diakses pada tanggal 23 mei 2022, jam 10.00.
https://serambinews.com_Nelayan_Aceh. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018

<https://dkp.acehprov.go.id/index.php/profil/read/20122/10/12/116/pelabuhan-perikanan-Aceh-Selatan> .html

http://www.academia.edu/32993954/Metode_Penelitian_kualitatif. diakses pada tanggal Juni 2018



Lampiran Pedoman Wawancara

- A. Apa saja program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan kartu E Kusuka?
1. Kapan kartu E Kusuka diterbitkan?
 2. Apa saja tujuan pembuatan kartu E Kusuka?
 3. Siapa saja yang mendapatkan kartu E Kusuka?
 4. Apa kriteria penerima kartu E Kusuka?
 5. Bagaimana cara mendapatkannya?
 6. Apa saja program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kartu E Kusuka?
 7. Berapa jumlah program yang sudah di rancang melalui kartu E Kusuka?
 8. Apakah semua program mengarah ke pemberdayaan?
 9. Apa saja program yang berkembang dengan pemberdayaan?
- B. Bagaimana realisasi program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan kartu E Kusuka dalam mendukung fasilitas usaha nelayan di Aceh Selatan?
1. Apakah bapak tahu kartu E Kusuka?
 2. Apakah bapak tahu untuk apa kartu E Kusuka?
 3. Selama nelayan sudah memiliki kartu E Kusuka, apakah sudah ada program yang ditawarkan?
 4. Apa saja program dari kartu E Kusuka yang sudah di realisasikan?
 5. Apakah program-program yang sudah direalisasikan ditujukan untuk semua para pemegang kartu E Kusuka?
 6. Apakah semua jenis program dari kartu E Kusuka telah bapak dapatkan?
 7. Apakah semua program yang sudah dirancang terealisasi semuanya?
- C. Apakah realisasi program melalui kartu E Kusuka bisa diberdayakan masyarakat nelayan di Aceh Selatan?
1. Dengan adanya realisasi program melalui kartu E Kusuka, apakah hasil yang diperoleh sudah mengalami peningkatan?
 2. Apakah contoh bentuk pemberdayaan yang dirasakan meningkatnya hasil yang dirasakan nelayan?
 3. Apa upaya-upaya yang ditempuh untuk pemberdayaan nelayan hanya sebatas bantuan atau ada binaan secara intensif?
 4. Siapa saja yang diuntungkan dengan adanya program tersebut?
 5. Apakah bapak merasa puas atau terbantu dengan adanya program tersebut?

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1: Wawancara dengan pembina KNTI, juga panglima laot trumon



Gambar 2: Wawancara dengan nelayan pasie seubdaeh



Gambar 3: Wawancara dengan nelayan dari kecamatan bakongan



Gambar 4: Wawancara dengan panglima laot pasie seubadeh



gambar 5: Wawancara dengan jerry ketua KNTI aceh selatan

